



Pemerintah Daerah
Kabupaten Bungo

Kompilasi Data **Inspektorat** **Kabupaten Bungo 2025**



Inspektorat Kabupaten Bungo



Pemerintah Daerah
Kabupaten Bungo

Kompilasi Data **Inspektorat** **Kabupaten Bungo 2025**



Inspektorat Kabupaten Bungo

Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo 2025

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Hj. Suryana Hendrawati, S.E., M.E., CGCAE

Editor

.....

Penulis

Dede Kurniawati, S.H.

Pengolah data

.....

Desain Cover dan Tata Letak

.....



INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
Hj. SURYANA HENDRAWATI, S.E., M.E., CGCAE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagai upaya pengelolaan informasi yang efektif dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Kompilasi Data ini disusun untuk memenuhi kebutuhan data yang komprehensif mengenai aspek-aspek pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

Penyusunan kompilasi data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi capaian, tantangan, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internal di daerah. Dengan informasi yang terstruktur dan berbasis data ini, kami berharap dapat mempermudah akses dan pemanfaatan data oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, terukur, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dalam pengumpulan, pengolahan, maupun penyusunan data ini. Semoga Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan kinerja dan integritas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat Kabupaten Bungo.

Bungo, Februari 2025
Inspektur

Hj. Suryana Hendrawati, S.E., M.E., CGCAE

DAFTAR ISI

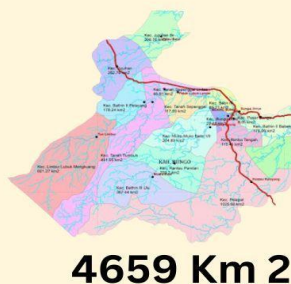
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Demografi Kabupaten Bungo	2
1.4. Konsep dan Definisi	6
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN	8
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2.2. Struktur Organisasi	12
BAB III DATA TABEL	13
3.1.	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Bungo	5
Gambar 1.2 Kecamatan di Kabupaten Bungo	5
Gambar 1.3 Luas Wilayah dan Penduduk di Kabupaten Bungo	6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	14



Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo



17 Kecamatan



376.382 Jiwa

80,8 Jiwa/Km2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bungo. Dalam era keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, kebutuhan akan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses menjadi sangat penting. Data yang terstruktur dan terintegrasi memudahkan Inspektorat dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kinerja pengawasan di seluruh lingkup pemerintahan daerah.

Kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan memerlukan sistem pengawasan yang andal dan responsif. Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo diharapkan menjadi referensi utama dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang pengawasan. Dengan adanya kompilasi data ini, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang lebih baik antar instansi, serta mempermudah identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penguatan.

Penyusunan Kompilasi Data ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberadaan data yang akurat dan terstruktur di dalam Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo akan menjadi landasan dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Penyusunan Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo bertujuan untuk :

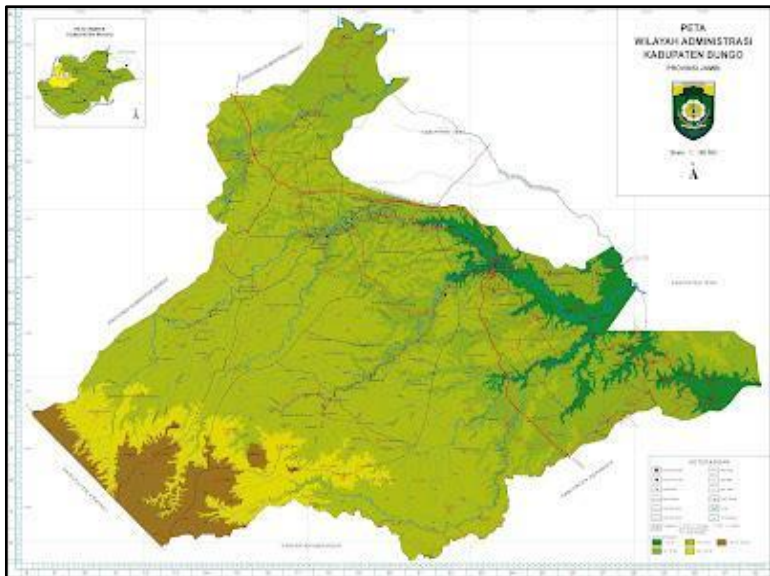
1. Menyediakan Data Terstruktur dan Akurat : Membangun sumber data yang komprehensif dan terintegrasi, yang memuat informasi mengenai aktivitas pengawasan, audit, dan evaluasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan : Mempermudah Inspektorat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran di berbagai sektor pemerintahan. Dengan data yang tersusun dengan baik, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan : Menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses, yang sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai hasil kinerja pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Memfasilitasi Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah : Sebagai dasar dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta dalam menyusun rekomendasi peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan. Data ini dapat menjadi alat evaluasi yang penting dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang lebih baik.

5. Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti: Menyediakan data yang valid sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, terutama dalam bidang pengawasan dan pembinaan di lingkup pemerintah daerah.

Dengan penyusunan kompilasi data ini, diharapkan dapat terwujud sistem pengawasan yang lebih terukur dan efektif dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Bungo. Demografi Kabupaten Bungo.

1.3 Demografi Kabupaten Bungo

a. Wilayah Kabupaten Bungo



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Bungo

Kecamatan se-Kabupaten Bungo		
Pelepat	Bathin III	Tanah Tumbuh
Pelepat Ilir	Rantau Pandan	Limbur Lubuk Mengkuang
Bathin II Babeko	Muko-Muko Bathin VII	Bathin II Pelayang
Rimbo Tengah	Bathin III Ulu	Jujuhan
Bungo Dani	Tanah Sepenggal	Jujuhan Ilir
Pasar Muara Bungo	Tanah Sepenggal Lintas	

Gambar 1.2 Kecamatan di Kabupaten Bungo

b. Penduduk Kabupaten Bungo 2024

Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Km ²)
Pelepat	1069.07	37156	34.8
Pelepat Ilir	410.29	52428	127.8
Bathin II Babeko	176.29	15312	86.9
Rimbo Tengah	96.9	35344	364.7
Bungo Dani	35.97	28303	786.9
Pasar Muara Bungo	9.21	21285	2311.1
Bathin III	80.46	28388	352.8
Rantau Pandan	239.61	10840	45.2
Muko-Muko Bathin VII	186.73	15777	84.5
Bathin III Ulu	373.83	10020	26.8
Tanah Sepenggal	106.92	25160	235.3
Tanah Sepenggal Lintas	77.51	24001	309.7
Tanah Tumbuh	236.55	15459	65.4
Limbur Lubuk Mengkuang	932.41	17277	18.5
Bathin II Pelayang	179.84	9071	50.4
Jujuhan	254.12	20285	79.8
Jujuhan Ilir	193.04	10276	53.2
Bungo	4659	376382	80.8

Gambar 1.3 Luas Wilayah dan Penduduk di Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sebesar 4.659 kilometer persegi. Luas wilayah terluas dipegang oleh Kecamatan Jujuhan (254,12 km²), sedangkan luas wilayah terkecil dipegang oleh Kecamatan Pasar Muara Bungo (9,21 km²).

Secara keseluruhan, Kabupaten Bungo memiliki kepadatan penduduk sebesar 80,8 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Pasar Muara Bungo (2.311,1 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pelepat Ilir (53,2 jiwa/km²).

Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bungo. Hal ini menyebabkan kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni 21285 jiwa. Kecamatan Bungo Dani, Rimbo Tengah, dan Pelepat Ilir memiliki luas wilayah yang cukup besar dan juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi baru di Kabupaten Bungo.

Kecamatan Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu, Limbur Lubuk Mengkuang, Tanah Tumbuh, dan Bathin II Babeko memiliki luas wilayah yang cukup besar, namun memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah-daerah baru untuk pemukiman penduduk.

Kabupaten Bungo memiliki variasi luas wilayah dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah yang maju dan berkembang.

1.4. Konsep dan Definisi

Berikut adalah jenis data yang dapat ditampilkan dalam Kompilasi Data Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, beserta definisi untuk setiap data tersebut :

1. **Data Audit Kinerja** : Data ini mencakup hasil audit kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bungo. Audit kinerja bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Data ini dapat menunjukkan sejauh mana capaian program sesuai dengan tujuan serta penggunaan sumber daya secara optimal.
2. **Data Audit Kepatuhan**: Data ini merupakan hasil audit yang mengukur tingkat kepatuhan OPD terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Audit kepatuhan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Data ini penting untuk meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan ketidaksesuaian pelaksanaan.
3. **Data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program**: Data ini berisi informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Data monev mencakup capaian indikator, kendala, serta rekomendasi untuk perbaikan, sehingga menjadi acuan dalam evaluasi kinerja secara berkala.

4. Data Pengaduan Masyarakat: Data ini mencakup informasi mengenai laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Pengaduan ini dapat berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaksesuaian pelayanan publik, atau pelanggaran disiplin. Data ini penting sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.
5. Data Pembinaan Aparatur: Data ini memuat informasi mengenai kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada aparatur pemerintah daerah, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi tentang aturan atau etika kerja. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
6. Data Penanganan Pelanggaran Disiplin: Data ini terdiri dari laporan kasus pelanggaran disiplin aparatur yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, beserta tindak lanjut yang diambil. Data ini mencakup jenis pelanggaran, sanksi, dan hasil penanganannya. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedisiplinan dan memastikan tindakan sesuai peraturan berlaku.
7. Data Laporan Hasil Pengawasan: Data ini berisi laporan lengkap mengenai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, termasuk temuan-temuan, rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjut yang telah atau sedang dilakukan oleh OPD terkait. Laporan hasil pengawasan ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

8. Data Risiko Pengawasan: Data ini memuat identifikasi risiko yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan di OPD. Melalui analisis risiko, Inspektorat dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus atau tindakan pencegahan agar risiko-risiko tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
9. Data Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan: Data ini mencatat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat setelah pelaksanaan audit atau pengawasan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa OPD telah menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi secara efektif sebagai bagian dari upaya perbaikan.
10. Setiap jenis data di atas berfungsi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja, kepatuhan, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, serta untuk membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024

a. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki tugas pokok dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Tugas pokok tersebut meliputi :

- a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah: Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- b. Audit dan Pemeriksaan Internal: Melakukan audit internal pada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
- c. Evaluasi dan Monitoring Program Pemerintah Daerah: Mengawasi, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.
- d. Pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah: Memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membangun pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

- e. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran: Mengidentifikasi potensi pelanggaran dan melakukan langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam penanganan kasus atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan: Merangkum dan menyusun laporan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja OPD dan pemerintah daerah secara keseluruhan, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada pimpinan daerah dan publik.

Melalui pelaksanaan tugas-tugas pokok ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

b. Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo menjalankan berbagai fungsi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

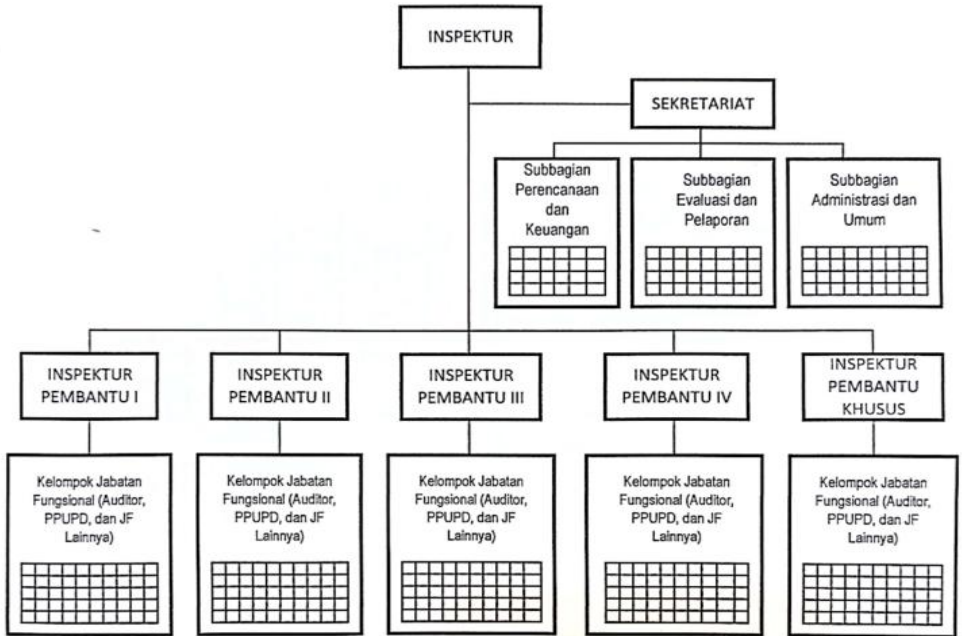
1. Fungsi Pengawasan Internal : Melaksanakan pengawasan secara internal terhadap kinerja dan tata kelola seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Bungo, guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Fungsi Audit Kinerja dan Kepatuhan : Melakukan audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap program dan kegiatan

pemerintah daerah untuk menilai efisiensi, efektivitas, serta kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

3. Fungsi Monitoring dan Evaluasi : Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, guna memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan berdaya guna bagi pembangunan daerah.
4. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur : Membina dan mengawasi aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas, integritas, dan etika kerja di lingkungan pemerintahan.
5. Fungsi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran : Mengidentifikasi risiko dan potensi penyimpangan, serta melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Inspektorat juga berfungsi dalam menangani kasus pelanggaran disiplin aparatur jika terjadi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan wewenang.
6. Fungsi Pelaporan dan Rekomendasi : Menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah berdasarkan hasil pengawasan, audit, dan evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja OPD dan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo berperan sebagai pilar pengawasan dalam pemerintahan daerah, mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab bagi masyarakat Kabupaten Bungo.

2.2. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo terdiri dari :

A. Inspektur

B. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

- C. Inspektur Pembantu I
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya).
- D. Inspektur Pembantu II
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya)
- E. Inspektur Pembantu III
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya).
- F. Inspektur Pembantu IV
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya).
- G. Inspektur Pembantu Khusus
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya).

BAB III

DATA TABEL

3.1.Data Jumlah Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, 2020 - 2024

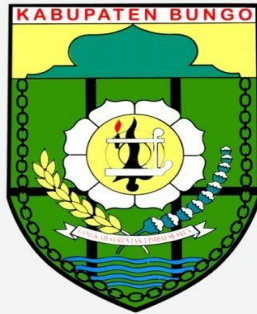
NO	Tahun	Pemeriksaan Khusus	Pemeriksaan Reguler	Pemantauan Tindak Lanjut	Klarifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2020				
2	2021				

3	2022				
4	2023				
5	2024				

3.2. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) Kabupaten Bungo, 2020 – 2024

NO		OPINI			
	TAHUN	WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP)	TIDAK WAJAR (WJ)	TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT (TMP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2020				
2	2021				
3	2022				
4	2023				
5	2024				

3.3.



Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo